

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam (studi kasus pada kawasan teluk bintuni kabupaten manokwari irian jaya)

Ubaldu Rumulus, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=97677&lokasi=lokal>

Abstrak

Kawasan teluk Binnmi dengan luas 18.637 Km² atau 49,17% dari luas Kahupaien Manokwari Irian Jaya dengan potcnsi sumber daya alam yang meiiimpah meppakan peluang bagi para investor untuk mclirik dan mcnanamkan modal di kawasan tclul< Bintuni guna menggali, mcngarnbil dan mengolahnya.

Tercatal 13 perusahaan saat ini beroperasi di Kawasan Teluk Bi.ntuni,dengan nncian : 9 pcrusahaan pcmegang HPH; 1 penzsahaan penangkapan udang laut; I perusahaan perkebunan PIR kelapa Sawit. Dan 2 pemsahaan yang bergerak clisektor pertambangan yaitu LNG dan Minyak Bumi. Kehadiran perusahaan-perusahaan trcrsçbut belum banyak dirasakan dan menikmati manfaat oleh masyarakat lokal. Mzsyarat hanya sebagai penonton . texpinggirkan, tidak terlibat dan bespanisipasi dalam kcgiatan pengoaahan sumber daya alam.

Penelitian ini mencoba mengungkapkkan institusi sosial dan slruktur sosial masyarakat lokal serta apa yang tidak mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam secara menguntungkan. Selain itu, kebhakan pemerintah maupun kebijakan perusahaan yang memberi peluang bagi partisipasi masyarakat lokal _juga menjadi kcjian dalam penulisan ini Kajian ini menclaah keteriibatan masyarakal lokal dalam pengolahan sumber daya alam dikawasxm tcluk Bintuni dilihal dari pertama, Instilusi Keluarga dan Pendidikan yang bcrpemn dalani' mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolalmn sumber days alam. Kedua, Stmklur sosial masyarakat yang pcnckanannya pada status dan peran serta perilaku yang ditata melalui pola hubungan baik vertikal maupun sejajar dalzzm masyarakat yang mempcngaruhi partisipasi. Ketiga, Kebnakan Pcmcrintah yang mcmbcri peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi. Dan A-eempat. kebijakan perusahaan yang beropemsi di kawasan teluk Bintuni yang menunjang partisipasi masyarakat lokal.

Keempat faktor tersebut dapat dihedakan dalam faktor irltemal dan faktor eksternal. Fal-tor internal mçliputi irustitusi sosial dan su-uktur sosial. Insiitusi sosial yaitu pcndidikan, menunjukkan bahwa anak SD dan desa-desa di 4 kecamatan yang ada di kawasan tciuk Bintuni rata-rata hanya 3 anak lulusan SD yang bisa melanjutkzm ke SMTP. Ini berarti sebagian bcsar anak putus sckolah dan tiuggal di dcsa dcngan jenjang pendiclkan rata-rata SD atau tidak tempat SD. Dengan demikian pcnghargaan untuk mendapat lowongan kerja bagi masyarakat lokal dengan jenjang pendidikan SD, kecil sekali peluangnya. Sclain itu, ketcrikatan individu dalam Keluarga bcsar (extended family) dimana kekerabaran dan kcpcntingan kqmunal lebih ditekankan, mangakibatkan indiwidp yang bekerja pada pcrusahaan tidak dapat bcrlahan karcna pola dan irama kemja masyarakat lokal yang bcbeda dengan pola kerja yang ditcrapkan pada perusahaan modercn dcngan aturan perusahaan yang ketat dan menghargai waktu sebagai uang. Dengan demikian, institusi sosial yang ada dalam masyarakat lokaal tidak dapat menunjang partisipasi masyarakat dalam

pengolahan sumber daya alam.

Begitu pula dengan struktur sosial yang tumbuh dan dipertahankan dalam masyarakat yang penekanannya pada status dan peran Kepala Klen atau Krcet dan Kepala Keluarga yang lebih menekankan kerja sama dalam kelompok kecil, sehingga menghambat masyarakat lokal tidak dapat memanfaatkan kehadiran perusahaan moderen. Lembaga Musyawarah Adat Masyarakat Teluk Bintun (LMAMTB) yang baru dibentuk oleh masyarakat di kawasan teluk Bintuni tahun 1995 diharapkan akan berperan sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah dan antara rakyat dengan perusahaan dan sekaligus dapat memalisasikan keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya nomor 50 Tahun 2001 tentang Standar Pembenaran Komposisi bagi masyarakat Adat atas Kayu yang dipungut pada Arcal Hak Ulayat di kawasan teluk Bintuni. Namun tantangan yang dihadapi LMAMTB adalah bagaimana upaya merangkul kelompok masyarakat yang masih miskin keberadaan LMAMTB menjadi suatu kekuatan yang tumbuh dari oleh dan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal dalam mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat yang meliputi Kebijakan pemerintah berupa UU /PP yang memberikan saluran dan peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat masih tersumbat dan terasa masih sangat kurang. Hal ini bisa dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeliharaan Daerah sebagai penjabaran dari pasal 18 UUD 1945 ternyata tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menjelaskan tentang batasan-batasan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi masyarakat untuk berperan serta dalam berbagai aktifitas di bidang sosial, ekonomi dan politik. Begitu pula kebijakan atau program nyata dari perusahaan untuk menunjang atau mendorong keterlibatan masyarakat lokal masih sangat terbatas dan sebaliknya perusahaan lebih berorientasi kepada elit penguasa karena pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan pengalangan sumber daya alam memberikan hak kepada Pemerintah untuk monopoli

Dapat disimpulkan bahwa baik faktor internal maupun faktor eksternal belum menunjang partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam di kawasan teluk Bintuni. Sama-sama cara yang bisa mendorong masyarakat agar dapat berperan serta dalam pengolahan sumber daya melalui proses belajar baik secara berjangka maupun melalui pelatihan keterampilan. Selain itu, saluran-saluran yang selama ini tersumbat perlu dibuka sehingga masyarakat ikut terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan politik dalam rangka menciptakan Good Governance dengan elemen utamanya adalah partisipasi masyarakat. Dan sudah saatnya bahwa perusahaan sebaiknya mulai merubah pola pendekatan yang semula dengan berorientasi kepada elit penguasa, supaya diganti dengan pendekatan masyarakat.